ANALISIS PENGARUH PAD DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

(skripsi)

Oleh

Nurul Hidayati

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

ABSTRACT

The Effect of Local Own-Source Revenue and Balancing Fund Againts Gross Domestic Regional Product Level District/City in Lampung Province

By

NURUL HIDAYATI

This study aimed to determined the effect of Local Own-Source Revenue and Balancing Funds to Gross Domestic Regional Product in Lampung Province during 2011-2015. The Independent variables in this study are Local Own-Source Revenue and Balancing Fund who consist of Sharing Revenue (DBH), General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK). This study uses tool is the panel data regression analysis the approach Fixed Effect Model (FEM).

The results of the study indicate that Local Own-Source Revenue variable gives positve significant effect on Gross Domestic Regional Product, General Allocation Fund variable gives positive significant effect on Gross Domestic Regional Product, Special Allocation Fund variable gives negative and significant effect on Gross Domestic Regional Product, and Revenue-Sharing variable gives negative and not significant effect on Gross Domestic Regional Product.

Keywords:Balancing Funds, GDRP, Local Own-Source Revenue of the district/city in Lampung Province

ABSTRAK

PENGARUH PAD DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PDRB KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

NURUL HIDAYATI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap PDRB kabupaten/kota Di Provinsi Lampung tahun 2011-2015. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Penelitian ini menggunakan metode alat analisis regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM).

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB, Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB, variabel DanaAlokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif signifikan terhadap PDRB, dan variabel Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB.

Kata kunci: Dana Perimbangan, PDRB, Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota Provinsi Lampung

ANALISIS PENGARUH PAD DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Nurul Hidayati

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

Judul Skripsi	:	**ANALISIS PENGARUH PAD DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG**
Nama Mahasiswa	:	Nurul Hidayati
No. Pokok Mahasiswa	:	**0911021019**
Jurusan	:	Ekonomi Pembangunan
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Muhammad Husaini, S.E., M.E.P.
NIP 19601220 198903 1 004

2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Muhammad Husaini, S.E., M.E.P.** .....

   Penguji I : **Dr. Lies Maria Hamzah, S.E., M.E.** .....

   Penguji II : **Emi Maimunah, S.E., M.Si.** .....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Januari 2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

" Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai peraturan yang berlaku"

Bandar Lampung Januari 2017

Nurul Hidayati

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Desa Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 10 Januari 1991, sebagai anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan bapak Sujadi dan ibu Mariyam.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 1 Depok Rejo pada tahun 2003 dan dilanjutkan di SMP N egeri 1 Punggur yang lulus pada tahun 2006. Selanjutnya, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Kotagajah yang selesai pada tahun 2009.

Pada tahun 2009, penulis diterima perguruan tinggi Universitas Lampung melalui Jalur Penelusuran Kemampuan Akademik dan Bakat (PKAB) pada jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan seperti, HIMEPA, BEM-U, dan DPM-U.

MOTTO

“ ……..Katakanlah : “ Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” sesungguhnya yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang mempunyai pikiran”

(Q.S Az-Zumar 9)

“sungguh tidak ada mawar yang tumbuh di tegarnya karang”

(Tere Liye)

“berangkat dengan penuh keyakinan berjalan dengan penuh keikhlasan istiqomah dalam menghadapi cobaan”

(Nurul Hidayati)

PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati, doa serta rasa syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang, motivasi, semangat dan nasehat yang tak pernah berhenti dan tak mampu terbalaskan sampai kapanpun.

Kakak-kakakku, Neni prihatni, Nita Antariksa dan Tri Yuniarti yang selalu memberikan warna dalam hidupku.

Sahabat-sahabatku dari Jurusan Ekonomi Pembangunan, BEM-U dan DPM-U yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya, terima kasih atas kebersamaan kita selama 4 tahun di Fakultas Ekonomi.

Almamater tercinta Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung, sebagai langkah awal untuk menambah ilmu dan pengalaman demi masa depan yang lebih baik.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-nyasehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung" Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung. Penulis telah banyak menerima bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati sebagai wujud rasa hormat dan penghargaan serta terimakasih yang sebesar- besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E, M.Si. selalu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Dr Nairobi, S.E, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Emi Maimunah, S.E, M.Si selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Husaini, S.E, M.Si.selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis serta memberikan ilmu, saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. I Wayan Suparta , S.E, M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan perhatian dan pengarahan kepada penulis selama menjadi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.
7. Para staf dan pegawai di Jurusan Ekonomi Pembangunan Bu Yati, Bapak Ferry, Bapak Kasim, Mas Ma'ruf serta pegawai di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis yang telah membantu kelancaran proses skripsi ini.
8. Kedua Orang Tuaku Tersayang, Ayahku Bapak Sujadi dan juga Ibuku Ibu Mariyam. Terimakasih atas cinta, kasih sayang, didikan, doa, dukungan, pengorbanan dan nasihatnya.
9. Kepada kakak-kakakku Neni, Nita dan Tri. Terimakasih atas kasih sayang, doa, dukungan, ilmu nasihat dan kepercayaannya.
10. Kepada keponakanku Putra, Rafi, Alvira, Hafizh dan Anisa rajinlah belajar
11. Sahabat terbaik Elly , Wiwin, Andhika, Rulio, terimakasih atas dukungan dan canda tawa serta diskusi yang bermanfaat
12. Keluarga kosan Edelweis Mbak Esty, Mbak Dewi, Mbak Cory, Mbak Nani, Mbak Lilin, Mbak Welly, Mbak Windy, Mbak candra, Deni, Tiya, Sulis, Emilda, Febi, Nopi, Ayu, Merintania, terimaksih atas doa dan dukungan semangatnya.
13. Sahabat seperguruan tersayang: Elly, Adistya, Lina, Ngah Citra, Putri. Terimaksih atas hari-hari berharga yang kita lewati. Keep contact ya kalian istimewa.

14. Kepada teman-teman seperjuangan skripsi Mujayin, Bintang, Pandu, Iyai Ical, Gilang, Desfa. Perjuangan belum selesai. Tetap semangat!!
15. Terimakasih kepada teman-teman EP: Ridho, Lena, Devia, Mira, Ucil, Ezar, Ari Teguh, Guntur, Median, Desty, Eva, Novia dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimaksih atas kebersamaan kita selama ini.
16. Sahabat seperjuangan KAMMI Komisariat Unila : Martini, Wiwin, Nurhalimah, Mbak Serly, Mbak septy, Mbak Zahra, Kak Rusli, Kak Arjun, Arief, Putra Kak Nofra, Deni, Sani dan teman-teman yang tak disebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu dan kebersamaannya.
17. Terimakasih Kepada teman-teman seperjuangan DPMU periode 2012-2013 Andhika, Kak Nofra, Aak Roni, Kak Gigih, Ahun, Yudho Kak Duo Gamal Rizka dan Rizki, Kak dwi, kak IO, Kak Budi, Kopral Riko, Vita, Ipeh, Anna, Tika, Chusna, Mbak wirna, Martini, Nurhalimah. Sampai jumpa di puncak kesuksesan sobat!
18. Terimakasih kepada Pimpinan Bem U KBM periode 2011/2012 Unila kak Rahmat, Mbak Sufi, Kak Basrin, Mbak zi, Kak Umam, Mbak Mida, Mbak Yuni, Mbak Ghesika, Kak Lekat, Kak Rahman, kak Herdizal, Mbak fitri, Andhika. Terimakasih atas kebersamaannya.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, Januari 2017

Penulis,

Nurul Hidayati

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI …….. i

DAFTAR GAMBAR ……. iii

DAFTAR TABEL …….. iv

DAFTAR LAMPIRAN …….. v

I. PENDAHULUAN ……. 1
A. Latar Belakang ……. 1
B. Rumusan Masalah …..……. 1
C. Tujuan Penelitian …….. 13
D. Manfaat Penelitian ……... 13
E. Kerangka Pemikiran ……..... 14
F. Hipotesis …… 15
G.Sistematika Penulisan …… 16

II. TINJAUAN PUSTAKA …… 17
A. Pengertian Otonomi Daerah ……..…….. 17
B. Desentralisasi Fiskal …….. 18
C. Hubungan Desentralisasi Fiskal Dengan Pertumbuhan Ekonomi …… 19
D. Indikator Desentralisasi Fiskal penerimaan daerah …….. 24
1. Pendapatan Asli Daerah …….……. 25
2. Dana Perimbangan …….. 29
1. Dana Alokasi Umum ……. 29
2. Dana Alokasi Khusus …… 30
3. Dana Bagi Hasil ……. 30
E. Produk Domestik Regional Bruto …… 35
F. Hubungan PAD dengan PDRB …… 39
G. Hubungan Dana Perimbangan Dengan PDRB…….……. 39
H. Penelitian Terdahulu ……..... 41

III. METODE PENELITIAN …… 43
A. Jenis dan Sumbe Data …….……. 43
B. Definisi Operasional ……..…… 43
C. Metode Analisis Data ……..……. 45

IV Hasil Dan Pembahasan …….. 55
A. Gambaran Umum Objek Penelitian ……..…….…….. 55
B. Analisis Data ……..……. 59
C. Hasil Estimasi Data Panel …… 68
1. Pengujian Hasil Estimasi …….. 68
2. Estimasi Hasil Regresi Data Panel Dengan Pendekatan Fixed Effet ……. 70
D. Uji Hipotesis ……. 72
1. Uji Parsial (Uji t) …… 72
a. Variabel Pendapatan Asli Daerah …… 72
b. Variabel Dana Bagi Hasil …… 73
c. Variabel Dana Lokasi Umum ……. 73
d. Variabel Dana Alokasi Khusus …….. 73
2. Uji F …… 74
3. Uji Koefisien R^2 ……. 74
E. Pembahasan Hasil Estimasi ……. 75
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ……. 75
2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap PDRB ……. 76
a. Dana Bagi Hasil …… 76
b. Dana Alokasi Umum …… 78
c. Dana Lokasi Khusus …… 80
3. Analisis Interretasi Hasil Estimasi …… 81

V Simpulan Dan Saran .....…. …… 90
A. Simpulan …….…….……. 90
B. Saran …….. 91

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kerangka Pemikiran ……..……. 15

2. Grafik perkembangan variabel penerimaan dan PDRB Kota Bandar Lampung tahun 2011-2015 …… 85

3. Grafik perkembangan variabel penerimaan dan PDRB Kabupaten Lampung Tengah tahun 2011-2015 …….. 86

4. Grafik perkembangan variabel penerimaan dan PDRB Kota Metro tahun 2011-2015 …… 88

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Pendapatan Asli Daerah (dalam juta rupiah) dan Rata-rata Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (dalam juta rupiah) Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung 2011-2015 …….. 8

2. Jumlah Dana Perimbangan (dalam juta rupiah) dan Rata-rata Penerimaan Dana Perimbangan (dalam juta rupiah) Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 …….. 9

3. Penelitian Terdahulu ……..…… 41

4. Luas Ibukota Kabupaten Di Provinsi Lampung …….. 58

5. Pendapatan Asli Daerah (dalam juta rupiah) dan Rata-rata Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (dalam juta rupiah) Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung 2011-2015 ……. 59

6. Jumlah Dana Bagi Hasil (dalam juta rupiah) dan Rata-rata Penerimaan Dana Bagi Hasil (dalam juta rupiah) Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung 2011-2015 ……. 61

7. Jumlah Dana Alokasi Umum (dalam juta rupiah) dan Rata-rata Penerimaan Alokasi Umum (dalam juta rupiah) Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung 2011-2015 …… 63

8. Jumlah Dana Alokasi Khusus (dalam juta rupiah) dan Rata-rata Penerimaan Dana Alokasi Khusus (dalam juta rupiah) Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung 2011-2015 ……. 65

9. Jumlah PDRB Berdasarkan Harga Konstan (dalam juta rupiah) dan Rata-rata PDRB (dalam juta rupiah) Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung 2011-2015 …… 67

10. Hasil Uji Hausman ….…… 69

11. Ringkasan Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel Menggunakan Fixed Effect ……. 70

12. Hasil Uji Parsial (Uji t-Statistik) …….. 72

13. Hasil Uji F Data Panel…….…….. 74

14. Intersep Model Fixed Effect……..……. 81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Data Estimasi Panel ……..…….. L1

2. Hasil Uji Pooled Least Square ……..... L2

3. Hasil Uji Hausman …….……. L3

4. Hasil Uji Fixed Effect ……..……... L4

5. Tabel t ……. L6

6. Tabel F ……. L7

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses multidimensional yang meliputi berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam institusi nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, serta pengentasan kemiskinan atau perubahan total masyarakat untuk mencapai sasaran yang diinginkan (Todaro, 2004).

Sedangkan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya – sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Hal ini sering ditandai dengan terjadinya peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah produksi barang dan jasa. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pesat yaitu output yang meningkat, perkembangan teknologi, penyesuaian dan inovasi dalam bidang sosial.

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat adanya perubahan pertumbuhan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena didalamnya mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan dicapai oleh penduduk selama periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah atau masyarakat.

Reformasi yang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang cukup besar. Salah satu yang cukup besar pengaruhnya adalah dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien, stabilitas perekonomian dan pertumbuhan yang teguh reformasi memberikan rujukan terhadap aspek pemerintah untuk dibentuk berdasarkan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah menjadi penting dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah adalah pelimpahan atau pemberian wewenang dan kewajiban bagi daerah otonom untuk mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan sendiri dan melakukan pelayanan masyarakat berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 tahun 1999. Dengan diberlakukannya otonomi daerah dimaksudkan untuk memaksimalkan pengelolaan daerah oleh pemerintah daerah dengan bersumber pada potensi daerahnya. Otonomi daerah menjamin kewenangan daerah dalam mengelola daerahnya dan tidak lagi menjalankan sebuah fungsi yang hanya sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat. Atau dengan kata lain, daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi pemerintah pusat, tetapi benar-benar

mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengembangkan potensi yang selama era sentralisasi bisa dikatakan terpasung (Mardiasmo, 2002).

Berlakunya kebijakan otonomi daerah memunculkan fenomena pemekaran wilayah baru baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dari sebelumnya berjumlah 27 provinsi di tahun 1998 menjadi 34 provinsi ditahun 2014.begitu juga pemekaran kabupaten/kota dari sebelumya 344 menjadi 514 di tahun 2014 dengan besarnya kabupaten sebesar 274 dan 70 kota di tahun 1999 menjadi 416 kabupaten dan 90 kota ditahun 2014.

Mengikuti fenomena nasional begitupun yang terjadi di Provinsi Lampung Pemekaran wilayah Provinsi Lampung berlangsung periode 1991 hingga 2012. Pemekaran wilayah administrasi pertama membentuk Kabupaten Lampung Barat sebagai hasil pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Utara. Pemekaran wilayah administrasi Provinsi Lampung yang terbaru pada tahun 2012. Pemekaran wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2012 membentuk Kabupaten Pesisir Barat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut secara resmi jumlah Kabupaten di Provinsi Lampung menjadi 15 kabupaten/kota.

Berdasarkan pemekaran yang terjadi yang membentuk 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, jika dilihat dari tahun terbentuknya wilayah administrasi baru, maka dalam penelitian ini hanya akan memasukan 14 kabupaten/kota. Dimana hanya Kabupaten Pesisir Barat yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini, dikarenakan kabuapeten tersebut baru terbentuk pada tahun 2012. Sehingga data yang tersaji pada kabupaten tersebut belum memenuhi mekanisme penghitungan penelitian ini.

Selain munculnya fenomena pemekaran wilayah akibat adanya kebijakan otonomi daerah, yang menjadi penting untuk disoroti adalah dengan munculnya kebijakan dari sisi keuangan daerah yaitu kebijakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan sebuah upaya atau kerangka kinerja pelaksanaan kegiatan bernegara dengan tujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dimana dengan diberlakukanya peraturan terkait desentralisasi fiskal ini menjadikan adanya pelimpahan wewenang kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahan secara otonom seperti halnya wewenang melakukan pengeluaran dalam hal ini adalah pembelanjaan, kewenangan memungut pajak, pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat, dan adanya bentuk transfer dari pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal menjadi fokus yang paling disoroti dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dimana desentralisasi fiskal berpengaruh penting dalam proses pembangunan. Desentralisasi fiskal dalam pelaksanaanya memuat kebijakan fiskal merupakan instrumen dalam penyelenggaraan pemerintah yang sangat penting perananya dalam perekonomian yaitu dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menyoroti desentralisasi fiskal dalam peranannya mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi isu yang menarik dan menjadikan isu ini banyak menjdai perhatian para peneliti untuk diteliti. Namun dalam beberapa penelitian mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi memberikan kesimpulan yang berbeda-beda dari para peneliti yang telah mengaji mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian Zhang dan Zhou (1998) yang dilakukan pada tingkat provinsi di Cina memberikan kesimpulan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penemuan ini mengejutkan karena biasanya kebijakan desentralisasi fiskal memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi. Dari kesimpulan bahwa desentralisai fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi memberikan kesimpulan bahwa mengenai kebijakan fiskal dengan dampak yang luas bagi negara maka lebih baik untuk dilakukan oleh pemerintah pusat.

Disisi lain dalam penelitian yang dilakukan oleh Vaquest dan MC Nab (2001) meneliti hubungan antara desentralisasi fiskal, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini memberikan temuan bahwa tidak adanya hubungan langsung antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Tidak adanya hubungan yang dimaksud adalah baik hubungan positif maupun hubungan negatif. Dalam kesimpulannya tidak adanya hubungan secara langsung antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi memberikan saran untuk penelitian berikutnya untuk memasukkan dimensi seperti pengangguran dan dimensi-dimensi lainnya.

Beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia dalam tujuannya untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal juga memberikan kesimpulan yang berbeda-bed. Dalam penelitian yang dilakukan Jumadi, dkk (2013) ini memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal memberikan manfaat bagi pembangunan daerah di kabupaten / kota di Jawa Timur , hal ini ditunjukkan dengan :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aspek indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli .

2. Meningkatkan kualitas infrastruktur
3. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan kualitas infrastruktur. Lalu, ada indikasi perbedaan dalam efektivitas pelaksanaan desentralisasi di seluruh kabupaten / kota dan indikasi bahwa peran sektor swasta adalah dominan dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Dalam hal ini kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini bahwa desentralisasi fiskal memberikan dampak yang positif bagi pembangunan daerah kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Jumadi dkk (2013). Penelitian yang dilakukan oleh Puji wibowo (2001) memberikan kesimpulan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan daerah selama periode 1999-2004. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa era baru desentralisasi fiskal yang diluncurkan sejak tahun 2001 ternyata memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap pembangunan daerah dibandingkan dengan rezim desentralisasi fiskal sebelumnya.

Dalam perannya desentralisasi fiskal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana dengan berlakunya desentralisasi fiskal maka mekanisme bernegara juga menjadi ikut berubah. Dalam hal ini meliputi hubungan pemerintah pusat terhadap daerah dari sebelumnya sentralistik menjadi desentralisasi. Hal ini menjadikan pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh dalam pemanfatan sumber-sumber pembiayaan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dibiayai dari dan atas beban anggaran pendapatan belanja negara dengan sumber pendapatan diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber-sumber pendapatan asli terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolahan kekayaan daerah lainnya, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro. Pendapatan daerah lainya berupa transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dimana dana transfer dari pemerintah pusat ini memiliki porsi paling besar terhadap pendapatan daerah.

Provinsi Lampung termasuk dalam daerah yang melaksanakan kebijakan tersebut, seperti daerah lainnya di Indonesia provinsi Lampung juga melaksanakan mekanisme desentralisasi fiskal, dengan menggali sumber-sumber penerimaan yang potensial untuk meningkatkan PAD. Dimana PAD merupakan sumber utama bagi pembiayaan kegiatan pembangunan daerah karena dengan kewenangan penuh seharusnya penerimaan PAD dapat dimaksimalkan untuk penyelenggaraan otonomi dan desentralisasi fiskal. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalitas yang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Pujiati, 2008)

dalam (Azzumar, 2011). Perkembangan PAD Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1 Pendapatan Asli Daerah dan Rata-rata Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (dalam juta rupiah) Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung 2011-2015

Daerah	Pendapatan Asli Daerah					rata-rata PAD
	2011	2012	2013	2014	2015	
Lampung Barat	15243	14329	28526	25769	37981	24369,6
Lampung Selatan	58619	58998	74062	96670	125152	82700,2
Lampung Tengah	37682	43802	65374	109937	98569	71072,8
Lampung Utara	12065	13523	17613	24804	32048	20010,6
Lampung Timur	20000	25160	40261	50466	90442	45265,8
Tanggamus	13028	14409	20000	35000	33634	23214,2
Tulang Bawang	22442	25203	27512	45433	28370	29792,0
Way Kanan	17206	13592	15909	30887	35963	22711,4
Bandar Lampung	118044	230920	374096	438997	563200	345051,4
Metro	28622	32760	52248	60224	91429	53066,6
Pesawaran	8486	14716	18106	30325	38678	22062,2
Pringsewu	3260	21916	24983	35693	52876	27745,6
Mesuji	4001	4590	9417	18698	22529	11847,0
Tulang Bawang Barat	1298	5300	7643	10000	22208	9289,8
Rata-rata seluruh Daerah						41.872,071

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2011-2015 (data diolah).

Berdasarkan Tabel 1 dilihat dari besarnya jumlah PAD dari tahun 2011-2015 kota Bandar Lampung adalah daerah di Provinsi Lampung dengan rata-rata PAD tertinggi dari tahun 2010-2014 yaitu sebesar 345051,4 juta rupiah yang kemudian disusul oleh Kabupaten Lampung Selatan yaitu dengan rata-rata penerimaan sebesar 82700,2 juta rupiah dan PAD terendah dengan rata-rata penerimaan dari tahun 2010-2014 terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 9289,8 juta rupiah yang kemudian disusul oleh Kabupaten Mesuji dengan rata-rata penerimaan sebesar 11847,0 juta rupiah.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa penerimaan daerah berupa PAD merupakan sumber daerah yang seharusnya lebih besar dari dana transfer yang dilakukan pemerintah pusat. Seharusnya PAD menjadi indikator penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Namun pada pelaksanaanya sumber terbesar bagi pembiyaan pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi terbesar diperoleh dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Hal ini dapat dilihat dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah yang tidak sebanding dengan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) berikut adalah perkembangan dana perimbangan pusat untuk Daerah Lampung. Perkembangan dana perimbangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Jumlah Dana Perimbangan dan Rata-rata Penerimaan Dana Perimbangan (dalam juta rupiah) Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2011-2015

Daerah	Jumlah Dana Perimbangan					Rata-rata dana perimbangan
	2011	2012	2013	2014	2015	
Lampung Barat	503.517	594.663	694.020	510.855	618.646	584.340
Lampung Selatan	690.616	841.214	888.534	984.136	1.030.958	887.092
Lampung Tengah	955.389	1.144.251	1.247.258	1.351.218	1.361.799	1.121.987
Lampung Utara	672.736	790.380	899.609	981.869	990.186	866.956
Lampung Timur	806.197	973.372	1.076.369	1.135.616	1.202.018	1.038.714
Tanggamus	561.462	670.459	715.670	801.427	848.304	719.464
Tulang Bawang	520.205	529.805	585.599	696.238	733.904	613.150
Way Kanan	482.849	576.940	643.879	704.131	788.264	639.213
Bandar Lampung	726.511	852.029	995.047	1.161.802	1.144.551	975.988
Metro	357.003	396.716	451.840	491.348	507.246	440.831
Pesawaran	468.083	560.576	640.737	742.152	724.975	627.305
Pringsewu	501.956	562.745	589.047	627.530	670.182	590.292
Mesuji	319.108	375.474	411.157	475.085	519.206	42.006
Tulang Bawang Barat	379.219	432.278	458.495	514.604	542.811	465.481
	567489,3	664350,19	735518,56	798429,3	834.504	686.630

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2010-2014 (data diolah).

Berdasarkan Tabel 2 mengenai dana perimbangan pusat terhadap kabupaten/kota di Provinsi Lampung rata-rata dana perimbangan dari tahun 2010-2014 terus meningka yaitu sebesar 567489,3 juta rupiah ditahun 2011, sebasar 735.518,56 juta rupiah ditahun 2013 dan sebesar 798429,3 juta rupiah ditahun 2014. Dengan porsi terbesar didapat oleh Kabupaten Lampung Tengah dengan rata-rata penerimaan 1.121.987 juta rupiah dan terbesar kedua didapat oleh kabupaten Lampung Timur dengan rata-rata penerimaan 1.038.714 juta rupiah dan besarnya dana perimbangan terkecil didapat oleh Kabupaten Mesuji yaitu dengan rata-rata penerimaan sebesar 42.006 juta rupiah dan besarnya dana perimbangan terkecil kedua adalah Kota Metro yaitu dengan rata-rata penerimaan sebesar 440.831 juta rupiah. Rendahnya transfer dana perimbangan terhadap kabupaten tersebut akibat luas wilayah yang kecil yang berakibat pada kecilnya jumlah penduduk serta adanya perubahan alokasi APBD akibat adanya pemekaran wilayah. Dengan adanya pemekaran wilayah berakibat pula pada jumlah penduduk di wilayah tersebut sehingga dana transfer berupa dana perimbangan terus menurun, namun secara keseluruhan penerimaan dana perimbangan ini cenderung meningkat.

Peningkatan Pendapatan daerah dimaksudkan untuk membiayai pelaksannaan pembangunan daerah yaitu dalam upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Salah satu tolak ukur dalam melihat kesejahteraan rakyat yaitu dilihat dari besaran pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno,2000).

Dalam melihat pertumbuhan ekonomi indikator yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana PDRB menurut badan pusat statistik (2015) PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Dari komponen-komponen desentralisasi fiskal ini penulis tertarik untuk meneliti pengaruh PAD, dan dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, DAK baik secara individu maupun bersama-sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Hasil yang ingin dicapai penulis adalah dapat menentukan apakah variabel dari PAD dan dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, penulis ingin mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel PAD dan dana perimbangan terhadap PDRB. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul "**Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten / Kota di Provinsi Lampung"**

B. Rumusan Masalah

Desentralisasi dipandang sebagai upaya memberikan kewenangan penuh kepada daerah dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. Banyak penelitian yang dilakukan karena banyaknya negara yang menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal ini karena anggapan desentralisasi memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Dari

beberapa penelitian yang sudah dilakukan menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda dan memberikan pemikiran untuk kembali meneliti permasalahan tersebut.

Dilihat dari data yang dipaparkan dalam latar belakang masalah bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi namun peningkatan pertumbuhan ini masih dipandang kecil karena masih besarnya ketergantunagan daerah terhadap dana perimbangan dari pusat yaitu berupa DAK/DAU hal ini menggambarkan bahwa PAD masih belum dioptimalkan.

Berdasarkan rumusan permasalah tersebut maka disusunlah pertanyaan penelitian yang akan diajukan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015?

2. Bagaimanakah pengaruh Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap PDRB ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015?

3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama terhadap PDRB ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015?

C. Tujuan

Sebagaimana yang diuraikan dalam rumusan permasalahan, maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015.

2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015.

3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015.

D. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi akademisi

   Penelitian ini diharapkan mampu membantu para civitas akademika untuk menakar sejauh mana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap PDRB 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Bagi Praktisi

   Penelitian ini diharapkan mampu membantu para praktisi ekonomi pembangunan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap PDRB 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Bagi masyarakat

   Penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan catatan dan informasi bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui sejauh mana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap PDRB 14 kabupaten/kota di provinsi Lampung Tahun 2011-2015

E. Kerangka Pemikiran

PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah, dan lain-lain Pendapatan yang sah. Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2000).

Berikut adalah Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah :

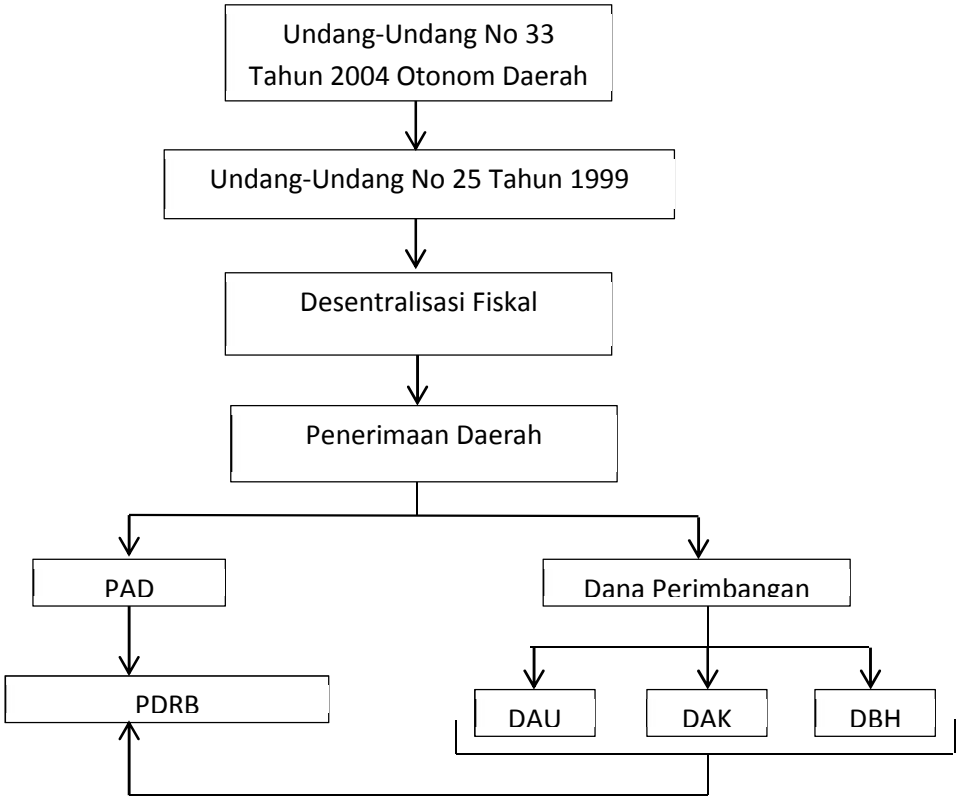

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian karena jawaban yang diberikan adalah berdasarkan teori-teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis dapat juga dipandang sebagai konklusi yang bersifat sangat sementara. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAD, dana perimbangan yaitu DAU, DAK, dan DBH secara simultan berpengaruh terhadap PDRB, secara parsial variabel-variabel tersebut dihipotesiskan sebagai berikut :

1. Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
2. Diduga Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
3. Diduga Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun sedemikian rupa dengan tujuan agar dapat dipahami lebih mudah. Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, dan sistematika penulisan penelitian.

II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dikemukakan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian

III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dikemukakan variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN /ANALISIS

Pada bab ini akan dikemukakan mengenai hasil analisis dan pembahasannya.

V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dikemukakan mengenai simpulan dan saran dari penelian yang telah dilakukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999. Dengan diberlakukannya otonomi daerah dimaksudkan untuk memaksimalkan pengelolaan daerah oleh pemerintah daerah dengan bersumber pada potensi daerahnya. Otonomi daerah menjamin kewenangan daerah dalam mengelola daerahnya dan tidak lagi menjalankan sebuah fungsi yang hanya sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat. Atau dengan kata lain, daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi pemerintah pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengembangkan potensi yang selama era sentralisasi bisa dikatakan terpasung (Mardiasmo, 2002).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi fokus dari sisi keuangan daerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan sebuah upaya atau kerangka kinerja pelaksanaan kegiatan bernegara dengan tujuan untuk memberikan pelayan publik yang lebih baik dimana dengan diberlakukanya peraturan terkait desentralisasi fiskal ini menjadikan adanya pelimpahan wewenang kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahan secara otonom seperti halnya wewenang melakukan pengeluaran dalam hal ini adalah pembelanjaan, kewenangan memungut pajak, pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat, dan adanya bentuk transfer dari pemerintah pusat.

Banyak manfaat yang bisa diambil dari adanya penerapan kebijkan desentralisai fiskal namun perlu adanya kapasitas yang memadai dan perlu adanya peningkatan keahlian dari aparatur negara sebagai penyelenggara pemerintahan. Apabila penyelenggaraan tidak diimbangi dengan kapasitas yang memadai dan peningkatan keahlian maka kebijakan yang banyak manfaat ini akan menjadi kebijakan yang justru membahayakan karena dapat terjadinya penyalah gunaan wewenang seperti adanya korupsi dari kurangnya akuntabilatas penyelenggara pemerintahan.

B. Desentralisasi fiskal

Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentarlisasi fiskal dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaaan kepada daerah termasuk kewenangan dalam desentralisasi fiskal. Penyelengaraan desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 yaitu tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Undang-undang tersebut bertujuan agar adanya pemerataan kemampuan fiskal antara daerah dan sebagai solusi kesenjangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah dan juga kesenjangan horizontal antara pemerintah daerah. Sebagai salah satu kebijakan publik desentralisasi fiskal kebijakannya diterapkan dalam masa transisi saat terjadinya reformasi yaitu transisi dari masa orde baru yang otoriter ke dalam pemerintahaan masa reformassi yang demokratis.

Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan terkait pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur sumber-sumber daerah berupa penerimaan dan pengeluaran daerah. Dengan diberlakukannya

kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan mampu mendorong efisiensi publik, bukti empiris dari sejumlah negara mendukung pendapat bahwa pelayanan masyrakat setempat yang dikontrol daerah cenderung dapat dilakukan dengan biaya lebih rendah dibandingkan dilakukan oleh pemerintah (Peterson, dan Brakarz, 1991). Sebaliknya, keberhasilan memetik manfaat-manfaat ini membutuhkan prasyarat-prasayat yang jarang terdapat dinegara-negara berkembang, seperti kapasitas administratif daerah yang baik dan pejabat-pejabat daerah yang responsif dan bertanggung jawab atas besarnya otoritas keuangan mereka (Bahl dan Linn, 1994) dalam Zulyanto (2010).

Banyak manfaat yang bisa diambil dari adanya penerapan kebijakan desentralisai fiskal namun perlu adanya kapasitas yang memadai dan perlu adanya peningkatan keahlian dari aparatur negara sebagai penyelenggara pemerintahan. Apabila penyelenggaraan tidak dimbangangi dengan kapasitas yang memadai dan peningkatan keahlian maka kebijakan yang banyak manfaat ini akan menjadi kebijakan yang justru membahayakan karena dapat terjadinya penyalahgunaan wewenang seperti adanya korupsi dari kurangnya akuntabilatas penyelenggara pemerintahan.

C. Hubungan desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi

Desentralisasi fiskal adalah salah satu kebijakan pemerintah pusat yang mempunyai prinsip dan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah *(vertical fiscal imbalance)* serta antar daerah *(horizontal fiscal imbalance),* meningkatkan kualitas pelayanan publik di

daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah; meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional, tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil; mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro. Dalam hal ini desentralisasi dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk melaksanakan sistem pemerintah di daerah secara otonom, dengan diserahkanya beberapa wewenang ini diharapkan efisiensi pelayanan masyarakat yang meningkat dapat memacu pertumbuhan ekonomi kearah positif.

Pemikiran tentang keterkaitan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi juga dikembangkan oleh Prud'Homme, (1995) (dalam Zulyanto, 2010) yang meyakini bahwa desentralisasi fiskal dapat berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi daerah di masa datang. Secara eksplisit dinyatakan bahwa pengeluaran publik terutama penyediaan infrastuktur bagi masyarakat akan lebih efektif dilakukan oleh pemerintah daerah karena mereka akan lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal . Prud'Homme (2003), (dalam Zulyanto, 2010) menyatakan empat area yang menjadi dampak utama dari pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu;

1. Effisiensi ekonomi umumnya desentralisasi selalu dikaitkan dengan usaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi. Baik efisiensi alokasi, yaitu Pembangunan yang berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal akan menjamin efisiensi economi.

2. Kestabilan ekonomi makro
3. Keadilan interpersonal dan interregional, dan
4. Efisiensi politik

Empat aspek di atas sangat terkait dengan fungsi/peranan pemerintah dalam perekonomian modern sebagaimana dinyatakan Mangkoesoebroto (1999).

Banyak peneliti yang sependapat dengan Prud Homme bahwa desentraliasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan posisi pemerintah daerah yang lebih baik memberikan pelayan publik dibandingkan pemerintah pusat dimana pemerintah daerah yang lebih dekat terhadap masyarakat di daerah tersebut. Seperti yang dinyatakan dalam penelitian Zhang dan Zou (1998), dalam penelitian ini diungkapkan bahwa seharusnya benar mengenai desentralisasi fiskal yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun desentralisasi menjadi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi jika mekanisme desentralisasi fiskal dijalakan dengan tidak semestinya.

Bahn dan Linn (1992), (dalam Zulyanto, 2010) berpendapat bahwa pendelegasian sebagian urusan keuangan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan konsekuensi dari pencapaian taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Pernyataan ini didukung oleh dua argumen sebagai berikut. Pertama,*median vote theory* yang memaparkan tentang respon dunia usaha atas selera dan preferensi masyarakat daerah. pelayanan publik disesuaikan dengan kehendak dan permintaan masyarakat setempat. Kedua, *fiscal mobility theory* yang menggambarkan tingkat mobilitas penduduk antar daerah yang dipicu oleh tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Perbaikan kualitas hidup orang akan

mendorong mereka untuk memilih daerah yang menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.

Selanjutnya Bahl dan Linn (1992), (dalam Zulyanto, 2010) menyatakan bahwa dengan diserahkannya beberapa kewenangan ke pemerintah daerah, diharapkan pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Karena pemerintah daerah lebih mengetahui karakteristik daerahnya masing- masing, maka pengeluaran infrastruktur dan sektor sosial akan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jadi menurut pandangan ini pemerintah daerah dipercaya dapat mengalokasikan dana kepada setiap sektor ekonomi secara efisien daripada yang dilakukan pemerintah pusat.

Oates menegaskan bahwa tingkat kemajuan ekonomi merupakan *outcome* dari kesesuaian preferensi masyarakat dengan pemerintah daerah yang tercipta karena makin pentingnya peran pemerintah daerah dalam otonomi daerah. Secara teori, desentralisasi fiskal diperkirakan akan memberikan peningkatan ekonomi mengingat pemerintah daerah mempunyai kedekatan dengan masyarakatnya dan mempunyai keunggulan informasi dibanding pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan di daerahnya. Respon yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap tuntutan masyarakat jauh lebih cepat karena berhadapan langsung denggan penduduk daerah/kota yang bersangkutan (Zulyanto, 2010).

Argument lainya juga dikemukakan oleh Breuss dan Eller (2004), (dalam Suriadi,dkk, 2014) yang menyatakan bahwa ada efek embivalen dalam hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga sulit untuk menarik rekomendasi yang jelas mengenai desentralisasi yang optimal. Hasil penelitian Breuss dan Eller menunjukkan bahwa tidak ada kejelasan, hubungan otomatis antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa penelitian juga dilakukan di Indonesia mengenai hubungan desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian Mulyono 2012 mengatakan bahwa rendahnya penyerepan akan menghambat laju pertumbuhan hal ini dibuktikan dengan tabungan tabungan/silpa cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Penelitian di Indonesia juga diungkapkan Wibowo (2006) bahwa Hasil penelitian memperlihatkan bahwa era baru desentralisasi fiskal yang diluncurkan sejak tahun 2001 ternyata memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap pembangunan daerah dibandingkan dengan rezim desentralisasi fiskal sebelumnya. Terdapat dua alasan yang dapat menjelaskan fenomena otonomi fiskal yang kurang *favourable* sebelum periode reformasi fiskal, yakni (i) kurangnya kompetensi para aparatur dan politisi daerah dalam menetapkan instrumen pendapatan daerah, dan (ii) monitoring pemerintah pusat atas penerapan Perda tentang pajak dan retribusi daerah yang kurang efektif.

Terdapat beberapa pendapat mengenai desentralisasi fiskal pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi ada yang menyimpulkan pengaruhnya positif karena adanya kewenangan daerah yang lebih otonom dalam melaksanakan system

pemerintahan, namun didapat juga kesimpulan negatif bahwa desentraliasai fiskal belum bisa diakatan pengaruhnya positif dikarenakan daerah yang masih bergantung terhadap transfer daerah.

D. Indikator Desentralisasi Fiskal Penerimaan Daerah

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah dalam menjalankan prinsip otonomi daerah, pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional perlu adanya pengaturan sumber daya nasional untuk memberikan kesempatan bagi daerah untuk dapat meningkatkan kinerja daerah demi tujuan kesejahteraan masyarakat. Daerah mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan penuh tanggung jawab sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sebagai daerah yang otonom.

Negara pada hakikatnya mempunya tiga fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan. Tiga fungsi utama yakni 1) fungsi alokasi yaitu fungsi pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi, 2) fungsi distribusi adalah peranan pemerintah dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan sebagai pemerataan pembangunan, 3) fungsi stabilisasi merupakan peran pemerintah dalam pertahanan keamanan, ekonomi, dan moneter.

Melihat dari ketiga fungsi dalam penyelengaraan pemerintahan fungsi distribusi dan juga fungsi stabilisasi lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah pusat sedangakan fungsi alokasi akan lebih efektif jika dilakukan oleh pemerintah daerah dalam arti pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan yang benar-

benar diperlukan oleh daerah. Namun, dalam pelaksanaanya perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan daerah. Dengan demikian, konsep perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat tercapai dengan semestinya.

Dalam rangka mendukung otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas dan nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan daerah yang terdiri dari penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah

Desentralisasi merupakan upaya penyelenggaraan tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh daerah. Penyerahan atau pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diikuti dengan pembiayaan. Setiap penyerahan dan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi ini disertai pengalihan sumber daya manusia dan

saran serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pelimpahan wewenang tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dibiayai dari dan atas beban anggaran pendapatan belanja negara dengan sumber pendapatan diantaranya pendapatan asli daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah :

a. Pajak Daerah

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam , Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

1. Sebagai sumber pendapatan daerah (*budegtary*)
2. Sebagai alat pengatur (*regulatory*)

b. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru disatu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarann atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolahan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2. Dana perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan daerah dan antar Pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari :

1. Dana Alokasi Umum

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah, proporsi yang diberikan kepada daerah minimal sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri neto. Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam

APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan.

2. Dana Alokasi Khusus

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah:

- Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi / prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer.

- Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

3. Dana Bagi Hasil

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004/ pp Nomor 55 tahun 2005 dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangaka pelaksanaan desentralisasi

Dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dimana menurut Pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak terdiri dari : “1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21”. Sedangkan pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari “1) kehutanan, 2) pertambangan umum, 3) perikanan, 4) pertambangan minyak bumi, 5) pertambangan gas bumi, 6) pertambangan panas bumi ”.

Proporsi Dana Bagi Hasil menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah meliputi 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, 64,8% untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota, dan 9% untuk biaya pemungutan.
Sedangkan 10% bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbangan sebesar 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota, dan sebesar 35% dibagikan sebagai intensif kepada daerah kabupaten dan kota

yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)

Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTP sebesar 80% dengan rincian 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah provinsi, dan 64% untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening kas umum daerah kabupaten/kota. Sedangkan 20% bagian pemerintah dari penerimaan BPHTP dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 merupakan bagian daerah adalah sebesar 20% yang dibagi antara Pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota. Dimana 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi.

d. Kehutanan

Penerimaan dari sektor kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 60% untuk daerah. Sedangkan penerimaan yang

berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% untuk Pemerintah dan 40% untuk daerah.

e. Pertambangan Umum

Dana Bagi Hasil dari penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

f. Perikanan

Dana Bagi Hasil dari penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk seluruh kabupaten dan kota.

g. Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dengan imbangan 84,5% untu Pemerintah dan 15,5% untuk daerah. Dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah sebesar 15% dibagi dengan imbangan 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil, dan 6% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran

pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil, 0,2% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

h. Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dibagi dengan imbangan 69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah. Dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah sebesar 30% dibagi dengan imbangan 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil, dan 12% dibagikan untuk kabupaten/kota dalam provinsi bersangkutan. Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil, 0,2% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

i. Pertambangan Panas Bumi

Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Dana bagi hasil dari penerimaan pertambangan panas bumi yang dibagikan kepada

daerah dibagi dengan imbangan 16% untuk Provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

E. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Salah satu indikator penting untuk menegetahui kondisi ekonomi disuatu wilayah/provinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukan oleh data produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga konstan atau atas dasar harga berlaku. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wiayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahunnya. Dalam penelitian ini tahun yang digunakan sebagai tahun dasar adalah tahun 2000. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

Sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertambahan ekonomi dari tahun ketahun.

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam menghitung PDRB :

1. **Pendekatan Produksi**

Menurut pendekatan ini, PDRB dihitung melakukan akumulasi nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada disuatu wilayah/provinsi dalam jangka tertentu dikelompokan kedalam 9 lapangan usaha ;

a. Pertanian
b. Pertambangan dan penggalian
c. Industri pengolahan
d. Listrik dan gas air, bersih
e. Bangunan
f. Perdagangan, Hotel dan Restoran
g. Angkutan dan komunikasi
h. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
i. Jasa-jasa.

2. Pendekatan pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini, merupakan jumlah balas jasa yang diteriama oleh faktor-faktor produksi yang diikuti serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu.

3. Pendekatan pengeluaran.

PDRB adalah semua komponen pengeluaran aktif seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stock, dan ekspor neto dalam jangka waktu tertentu.

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukan kondisi perekonomian setiap tahun. Manfaat yang didapat atau diperoleh adalah :

a. **PDRB atas dasar harga konstan**

- Menunjukan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/ setiap sektor ekonomi dari tahun ke tahun.
- Mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri, perdagangan antar pulau/antar provinsi.

b. **PDRB atas dasar harga berlaku.**

- Menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah tertentu. Nilai PDRB yang besar menunjukan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.
- Menunjukan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu wilayah tertentu.

F. Hubungan PAD dengan PDRB

Setelah diberlakukanya desentralisasi fiskal berdasarkan pasal 66 UU Nomor 25 tahun 1995 sumber pendapatan daerah terdiri salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan digulirkanya desentralisasi fiskal maka pemerintah daerah harus berpacu dan berlomba-lomba dalam dalam meningkatkan jumlah penerimaan PAD, karena dengan terus meningkatnya PAD maka dapat dikatakan

bahwa daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa bergantung dengan pusat.

Daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi pada setiap tahunnya maka akan memberikan kontribusi bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/ Provinsi dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan kinerja perekonomian suatu wilayah, dimana pertumbuhan ekonomi mengindikasikan keberhasilan pembangunan suatu wilayah hal ini dilihat dari besaran nilai PDRB, maka sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi endogen maupun agregat dimana pertumbuhan ekonomi bergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi yaitu penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal. Dengan meningkatnya PAD yang diproksikan sebagai akumulasi modal berarti hal ini juga sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi endogen tersebut yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari besaran nilai PDRB diutamakan faktor produksi dari endogen atau di dalam daerah itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan PAD yang terdiri dari diantaranya pajak dan retribusi daerah sebagai penerimaan daerah sangat bergantung dari intensitas kegiatan perekonomian yang dilakukan pemerintah daerah.

Sejalan dengan teori pertumbuhan endogen teori Keynes menerangkan bahwa tingkat kegiatan ekonomi ditentukan dari permintaan agregat. Menurut Keynes di masa yang akan datang perekonomian akan mempunyai kemampuan lebih besar

dalam menghasilkan barang dan jasa jika pada periode tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal.

Berdasarkan beberapa teori endogen dan Keynes PAD sebagai salah satu sumber pembentukan modal bagi kegiatan perekonomian, maka jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki daerah meningkat pula, sehingga pemerintah daerah lebih berinisiatif dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerah. Dengan semakin meningkatnya PAD akan memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan. Dengan pembangunan sarana dan prasaran serta infrastruktur oleh pemerintah daerah maka akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

G. Hubungan Dana Perimbangan Terhadap PDRB

Menurut (Peterson dan Brakarz, 1991) desentralisasi fiskal merupakan kebijakan terkait pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur sumber-sumber daerah berupa penerimaan dan pengeluaran daerah. Dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal mampu mendorong efisiensi publik.

Desentralisai merupakan kebijakan yang dilakukan untuk mendorong setiap institusi untuk dapat bersaing secara global. Desentralisasi merupakan kebijakan sebaliknya dari sentralisasi dimana sentralisasi adalah sistem pengelolaan dan kebijakan secara terpusat sedangkan desentralisai adalah merupakan pembagian dan pelimpahan wewenang.

Menurut Bhan dan Lim (1992) (dalam Zulyanto, 2010 berpendapat bahwa pendelegasian sebagian urusan keuangan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan konsekuensi dari pencapaian taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

Sumber-sumber daerah dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal selain dari pendapatan asli daerah ada penerimaan bagi daerah dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari tiga komponen yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

DBH merupakan bagian dari daerah yang bersumber dari penerimaan pajak dimana besarnya sudah diatur dalam undang-undang, untuk transfer DAU dari pemerintah pusat adalah untuk pemerataan pembangunan agar tidak terjadinya kesenjangan antar dan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang terjamin dan untuk DAK yang dialokasikan dari APBN yang diberikan bagi daerah khusus untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah sekaligus sebagai prioritas nasional yang tidak dapat diperkirakan secara umum.

Dapat disimpulkan selain dari sisi pengeluaran dampak dari kebijakan desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan terhadap pertumbuahan ekonomi juga penting untuk dilihat. Untuk menyeimbangkan anggaran pemerintah daerah agar tidak terjadi kesenjangan ransfer pusat terhadap daerah dalam bentuk DBH, DAU dan DAK diharapkan agar dapat menambah modal bagi daerah dalam melaksanakan rencana-rencana pembangunan. Dengan adanya dana transfer dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dengan upaya menambah modal bagi daerah hal ini berarti sesuai dengan teori pertumbuhan endogen dan Keynes

dimana dalam teori tersebut akumulasi modal merupakan hal yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini indikator pertumbuhan ekonomi dilihat dari besaran nilai PDRB.

H. Penelitian Terdahulu

Telah banyak ditemukan penelitan sebelumnya mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, namun kesimpulan yang dihasilkan tidaklah sama. Penelitian-penelitan tersebut menjadi bahan acuan bagi penulis untuk menulis penelitian ini. Seperti penelitian berikut tabel mengenai penelitian terdahulu.

Tabel 3 Daftar penelitian terdahulu PAD dan dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi

Studi	Lokasi	Variabel Dependent	Variabel Independent	Metode	Hasil penelitian
Zhang dan Zou (1998)	Cina tahun 1986-1992			Analisa regresi linier berganda	-Pertumbuhan tenaga kerja berpengaruh positif namun tidak signikan - pajak berpengaruh negatif tidak signifikan - desentralisasi berpengaruh negatif
Sri Andayani	Jawa Timur	Laju pertumbuhan PDRB	Desentralisasi fiskal rasio penjumlahan PAD dan BHPBP terhdap belanja daerah - Rasio PAD terhadap DAU	*Partial least square*	Desentralisasi fiskal berpengaruh negatif
Muhammad Rizky Azumar	Kabupat/ kota di Provinsi	Pertumbuhan ekonomi (PDRB)	PAD, dana perimbangan (DAU,DAK,D	Regresi linier berganda	Ada pengaruh yang positif antara

	Jawa Tengah	Kabupaten/kota Di Jawa Tengah 2005-2009	BH), investasi swasta, tenaga kerja	(*multiple linier regression method)* dengan metode kuadrat terkecil *ordinary least square*(OLS)	pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbanagan, investasi swasta, dan tenaga kerja. Namun untuk dana perimbanagn investasi swasta pengaruhnya tidak signifikan.
Mulyadi soamoele	Kabupaten kepulauan Sula	PAD	Pengeluaran pemerintah dan PDRB	Regresi Linier	Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. PDRB berpengaruh positif tapi terhadap PAD tidak signifikan
Reza monanda berutu	Kabupaten dairi	APBD	Pertumbuhan ekonomi	Metode kuadrat terkecil *ordinar least square*	Pengeluaran rutin dan peneluaran pembangunan berpengaruh posirif terhadap pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan tabel diatas dari penelitian-penelitian terdahulu dan hasil yang telah didapat maka penulis ingin membuktikan pengaruh PAD dan dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupeten/Kota di Provinsi Lampung, dengan menggunakan beberapa variabel yang ada dalam penelitian sebelumnya. Dari sekian banyak penelitian banyak yang mengahsilkan kesimpulan positif pengaruhnya PAD dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini akankah menemukan hasil yang sama.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan data yang bersifat kuantitatif. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Tipe data yang digunakan adalah data Panel yang meliputi data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umu (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sumber data akan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) , dinas pendapatan daerah, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, serta lembaga terkait lainnya, dan juga dari akses internet www.bps.go.id, www.bi.go.id, www.bpk.go.id, www.djpk.depkeu.go.id

B. Definisi Operasional

1. PDRB

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dalam penelitian ini akan dilihat dari besarnya nilai PDRB 14 kabupaten / kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015

dalam bentuk jutaan rupiah. PDRB merupakan jumlah nilai akhir produksi yang dihasilkan oleh sektor-sektor tersebut selama satu tahun fiskal.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah dalam penelitian ini akan dilihat dari Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran variabel PAD ini diukur dengan menggunakan skala rasio. Indikator PAD terdiri dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana PAD dalam penelitian ini adalah dana PAD 14 kabupaten kota di Provinsi Lampung dalam jutaan rupiah.

3. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga komponen. Komponen tersebut adalah dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dengan rinciannya adalah sebagai berikut:

1. **Dana Alokasi Umum**

   Dana Alokasi Umum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 yang diukur dalam jutaan rupiah.

2. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Khusus kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 yang diukur dalam jutaan rupiah

3. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Bagi Hasil kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 yang diukur dengan dalam jutaan rupiah.

C. Metode Analisis Data

1) Analisis Data

Dalam analisis model data panel dikenal tiga pendekatan yang terdiri dari *Common Effect, Fixed Effect* dan *Random Effect*. Ketiga pendekatan yang dilakukan dalam analisis data panel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan *Common Effect*

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dalam bentuk *pool*, dan menggunakan teknik kuadrat terkecil atau *least square* untuk mengestimasi koefisiennya. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa prilaku individu tidak berbeda dalam berbagai kurun waktu.

Persamaan regresinya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$y_{it} = \alpha + \beta_1 x_{it} + \varepsilon_{it}$$

untuk i = 1, 2, …, N dan t = 1, 2, …,T, dimana N adalah jumlah unit/individu *cross section* dan T adalah jumlah periode waktunya. Dari *commond effects model* ini akan dapat dihasilkan N+T persamaan, yaitu sebanyak T persamaan *cross section* dan sebanyak N persamaan *time series.*

2. Pendekatan *Fixed Effect*

Asumsi pembuatan model yang menghasilkan intersep konstan untuk setiap individu (i) dan waktu (t) dianggap kurang realistik sehingga dibutuhkan model yang lebih dapat menangkap perbedaan tersebut. Model efek tetap *(fixed effects),* model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi model *Fixed Effects* dengan intersep berbeda antar individu, maka digunakan teknik *variable dummy*. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable (LSDV).*

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$y_{it} = \alpha + \beta_1 x_{it} + \varepsilon_{it}$$

untuk i = 1,2, …, N dan t = 1,2, …, T, dimana N adalah jumlah unit/individu *cross section* dan T adalah jumlah periode waktunya.

3. Pendekatan *Random Effect*

Di dalam mengestimasi data panel dengan model *Fixed Effects* melalui teknik *LSDV* menunjukkan ketidakpastian model yang digunakan. Untuk mengatasi masalah ini kita bisa menggunakan variabel residual yang dikenal sebagai model *Random Effects*. Pada model ini, akan dipilih estimasi data panel dimana residual mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Oleh karena itu, pada model ini diasumsikan bahwa ada perbedaan intersep untuk setiap individu dan intersep tersebut merupakan variabel random atau stokastik. Sehingga dalam model ini terdapat dua komponen residual, yaitu residual secara menyeluruh, yang merupakan kombinasi *time series* dan *cross section*, dan residual secara individu yang merupakan karakteristik random dari observasi unit ke-*i* dan tetap sepanjang waktu.

Adapun persamaan regrsinya adalah sebagai berikut:

$$y_{it} = \alpha + \beta_1 x_{it} + \varepsilon_{it}$$

Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam model *random effect*. Secara matematis, asumsi tersebut terdiri dari:

$$E\,[E[\varepsilon_{it}\ |X] = E\,[\mu_i\ X] = 0$$
$$E\,[E[\varepsilon_{it}\ |X] = \sigma_\mu^2, \text{sehingga } \varepsilon_{it}\ \backsim N\,(0, \sigma_\mu^2)$$
$$E\,[E[\mu_{it}\ |X] = \sigma_\mu^2, \text{sehingga } \varepsilon_{it}\ \backsim N\,(0, \sigma_\mu^2)$$
$$E\,[E[\mu_i \varepsilon_{it}\ |X] = 0 \text{ untuk semua } t, i\ dan\ j$$
$$E\,[E[\mu_i \mu_i\ |X] = 0 \text{ jika } (i \neq j)$$
$$E\,[E[\mu_i \varepsilon_{it}\ |X] = E\,(\varepsilon_{it}, \varepsilon_{js}) = 0\ jika\ (i \neq j) atau\ (t \neq s)$$

Hal ini berarti bahwa komponen *error* tidak berkorelasi satu sama lain dan tidak ada autokorelasi antara *cross section* dan *time series*. metode OLS tidak bisa

digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien. Metode yang tepat untuk mengestimasi model *random effects* adalah *Generalized Least Squares (GLS)* dengan asumsi homoskedastik dan tidak ada *cross sectional correlation*. GLS merupakan OLS dengan transformasi variabel yang memenuhi asumsi standar dari OLS.

2. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel

Uji secara formal dikembangkan oleh Hausman. Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah menggunakan metode *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Uji statistik Hausman yang kemudian dibandingkan dengan *chi-square* tabel dengan besarnya *degree of freedom* sama dengan jumlah variabel independent dengan syarat :

$X_{statistik} > X_{tabel}$ atau *P-value* < α maka Ho ditolak dan model yang dipilih adalah *fixed effect* begitu juga dengan sebaliknya.

Batas kritis untuk menolak Ho didasarkan pada kriteria *chi-square* untuk tingkat signifikasi sebesar α dan derajat kebebasan ditulis df dan dituliskan dalam rumus:

$$H_x^2 df$$

Pada tingkat signifikasi (α) sebesar 5% dan derajat kebebasan (df) sebesar k-1 maka perbandingannya adalah sebagai berikut:

Chi square hitung (Hausman Test) > Chi square tabel maka Ho ditolak sehingga model estimasi yang dipilih *fixed effect* dan jika berlaku sebaliknya maka model estimasi yang digunakan adalah *random effect*.

Atau sebagai alternatif digunakan perbandingan

Jika P-value (Uji Hausman) < α (alpha) maka Ho ditolak dehingga model estimasi yang digunakan adalah *fixed effect* dan jika berlaku sebaliknya maka model estimasi yang digunakan adalah *random effect*.

3. Estimasi Model Regresi dengan Panel Data

Penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap PDRB daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung, menggunakan data *time-series* selama 5 (lima) tahun terakhir yang diwakili data tahunan dari 2011-2015 dan data *cross section* sebanyak 14 daerah mewakili kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Kombinasi atau *pooling* menghasilkan 70 observasi dengan fungsi persamaan data panelnya dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\mathrm{PDRB}_{it} = \beta_0 + \beta_1(PAD)_{it} + \beta_2(\mathrm{DAU})_{it} + \beta_3(\mathrm{DAK})_{it} + \beta_4(\mathrm{DBH})_{it} + \varepsilon_{it}$$

PDRB_{ti} = PDRB(dalam satuan jutaan rupiah)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (dalam satuan jutaan rupiah)

DAU = Dana Alokasi Umum (dalam satuan jutaan rupiah)

DAK = Dana Alokasi Khusus (dalam satuan jutaan rupiah)

DBH = Dana Bagi Hasil (dalam satuan jutaan rupiah)

α_0 = intersep

α_1, α_2 = koefisien regresi variabel bebas

ε_{it} = komponen error diwaktu t untuk cross-section i

i = 1,2,3.....14 (data *cross section* kabupaten/kota di Lampung)

t = 1,2...5 (data *time series* 2011-2015)

Untuk menjadikan *intersept* kabupaten/kota bervariasi dapat dilakukan dengan bantuan variabel *Dummy* (*diverential intercept dummies*), untuk melihat perbedaan perkembangan PDRB kabupaten/kota di Lampung selama lima tahun periode penelitian (2011-2015) Dimana kota Bandarlampung sebagai wilayah acuan (*benchmark*). Alasan penggunaan kota Bandarlampung sebagai benchmark adalah kota Bandarlampung merupakan ibukota Provinsi Lampung. Sehingga persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut:

$$PDRB_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_{21} + \alpha_3 D_{3i} +,,, + \alpha_{14} D_{14i} + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DBH_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 DAK_{it}$$

Dimana :

D1 = *dummy* Kab Lampung Barat

D2 = *dummy* Kab Lampung Selatan

D3 = *dummy* Kab Lampung Tengah

D4 = *dummy* Kab Lampung Utara

D5 = *dummy* Kab Lampung Timur

D6 = *dummy* Kab Tanggamus

D7 = *dummy* Kab Tulang Bawang

D8 = *dummy* Kab Way Kanan

D9 = *dummy* Kot Metro

D10 = *dummy* Kab Pesawaran

D11 = *dummy* Kab Pringsewu

D12 = *dummy* Kab Mesuji

α_0 = *Intercept* untuk PDRB kabupaten/kota dan dianggap sebagai kategori reverensi (exluded) sebagai pembanding

$\alpha_1 \ldots \alpha_{13}$ = *differential intercept coefisien* yang menunjukkan seberapa besar *intercept*

LB, LS, LTg, LU, LT, TG, TB, WK, MTR, PSW, MSJ, TBB berbeda dari α_1 (Produk Domestik Regional Bruto)

$\beta_1 \ldots \beta_4$ = Koefisien regresi pertumbuhan variabel dana perimbangan dan PAD untuk model PDRB

4. Pengujian Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t digunakan untuk melihat hubungan atau pengaruh antara variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat (Gujarati, 2010) hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

   H_0 : β_1 =0, Variabel PAD tidak berpengaruh terhadap PDRB.

   Ha : $\beta 1 \neq 0$, Variabel PAD berpengaruh terhadap PDRB.

2. Dana Bagi Hasil

   H_0 : $\beta_2 = 0$, Variabel DBH tidak berpengaruh terhadap PDRB.

   Ha : $\beta_2 \neq 0$, Variabel DBH berpengaruh terhadap PDRB.

3. Dana Alokasi Umum

   H_0 : $\beta_3 = 0$, Variabel DAU tidak berpengaruh terhadap PDRB.

   Ha : $\beta_3 \neq 0$, Variabel DAU berpengaruh terhadap PDRB.

4. Dana Alokasi Khusus

   H_0 : $\beta_4 = 0$, Variabel DAK tidak berpengaruh terhadap PDRB.

   Ha : $\beta_4 \neq 0$, Variabel DAK berpengaruh terhadap PDRB.

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

1). Jika $t_{hitung} < t_{tabel,}$ maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat

2). Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat

2. Uji F

Uji statistik *F* digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel independen secara serempak berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga nantinya dapat ditentukan apakah model persamaan linear yang diajukan dapat diterima atau tidak.

Dalam uji ini digunakan hipotesis sebagai berikut :

1) H_0 : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ diduga tidak ada pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK yang signifikan terhadap variabel PDRB.
2) Ha : $\beta 1 \neq \beta 2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ diduga secara bersama-sama PAD,DBH, DAU, dan DAK mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel PDRB.

$$F - \text{hitung} = \frac{\frac{R^2}{(k-1)}}{\frac{(1-R)^2}{(n-k)}}$$ Nilai F- hitung diperoleh dengan rumus :

Dimana :

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel independen

n = jumlah sampel

Kriteria pengujiannya :

1) Ho diterima (F hitung < F tabel) artinya variabel independen secara bersama- sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

2) Ha diterima (F hitung > F tabel) artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

4. **Koefisien Determinasi (R^2)**

Koefisien determinasi (R^2) nilainya berkisar antara 0 dan 1. semakin besar R^2 berarti semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen.

Formula untuk mencari nilai R^2 adalah sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} \qquad \text{atau:} \quad R^2 = 1 - \frac{SSR}{SST}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi berganda.

SSR = *Sum of Square Regression*, atau jumlah kuadrat regresi, yaitu merupakan total variasi yang dapat dijelaskan oleh garis regresi.

SST = *Sum of Square Total*, atau jumlah kuadrat total, yaitu merupakantotal variasi Y.

SSE = *Sum of Square Error*, atau jumlah kuadrat error, yaitu merupakan total variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh garis regresi.

Bila $R^2 = 0$ artinya variasi dari *Y* tidak dapat diterangkan oleh *X* sama sekali. Sementara bila $R^2 = 1$, artinya variasi dari *Y* 100 persen dapat diterangkan oleh *X*. Jadi, baik atau tidaknya suatu model ditentukan oleh nilai yang memenuhi $0 < R^2 R^2 < 1$.

5. Uji Asumsi Klasik

Kelebihan menggunakan data panel adalah data yang digunakan menjadi lebih informative, variabelitasnya lebih besar, kolinieriti yang lebih rendah diantara variabel dan banyak derajat bebas (*degree of freedom)* dan lebih efisien (Haryanto, 2005). Panel data dapat mendeteksi dan mengukur dampak dengan lebih baik dimana hal ini tidak bisa dilakukan dengan metode *cross section* maupun *time series*.

Panel data memungkinkan mempelajari lebih kompleks mengenai perilaku yang ada dalam model sehingga pengujian data panel tidak memerlukan uji asumsi klasik (Gujarati 1992, dalam Wahyuddi et al). Dengan keunggulan regresi data panel maka implikasinya tidak harus dilakukan uji asumsi klasik dalam model data panel (Verbeek, 2000; Gujarati, 2006; Wibisono, 2005; Aulia; 2004, dalam Shochrul R, Ajija, dkk. 2011).

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarka pembahasan hasli analisis maka kesimpulan selama penelitian tahun 2011-2015, variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, masing-masing berpengaruh sebagai berikut: Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Dari beberapa variabel penerimaan daerah yang memiliki pengaruh positif terhadap PDRB dapat meningkatkan PDRB hal ini disebabkan variabel penerimaan digunakan sebagai akumulasi modal dalam menopang pengeluaran daerah sehingga dapat menciptakan peningkatan PDRB. Namun meskipun kebijakan desentralisasi fiskal ini telah berjalan selama 15 tahun tetapi mash banyak potensi-potensi daerah yang belum

tergali dengan maksimal serta masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dimana hal ini dibuktikan selam 5 tahun periode pennelitian penerimaan berupa dana transfer dari pusat dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Lokasi Khusus (DAK) masih lebih besar dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibat dari hal itu terdapat kesenjangan pendapatan antar daerah. Akibat adanya kesenjangan pendapatan daerah inilah terdapat perbedaan pertumbuhan PDRB antar daerah.

B. Saran

Berdasarkan temuan dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya sitem desentralisasi fiskal ini diterapkan pada pemerintah daerah yang mampu untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini ketergantungan dalam penerimaan daerah dan lebih mengoptimalkan penerimaan masing-masing daerah. Dimana tujuan dari desentralisasi fiskal addalah untuk menciptakan pemerintahan yang mandiri.

2. Untuk menciptakan pemerintahan daerah yang mandiri maka dapat dioptimalkan bagi daerah dalam menggali sumber-sumber yang potensial yang dimiliki dengan baik dan secara maksimal. Cara untuk mengali sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial dapat dilakukan dengan dua cara yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi yaitu dengan cara melakukan pemungutan dengan

giat, cepat, teliti dan ketat serta dipermudahnya dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan cara ekstensifikasi yaitu mencari sumber-sumber penerimaan yang potensial dari luar daerah dengan misalnya menciptakan iklim investasi.

DAFTAR PUSTAKA

Budi, Purbayu Santosa & Retno Puji Rahayu. 2005. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri*. Jurnal. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Albert, Gerrard. 2014. *Analisis Korelasi Pendapatan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.* Jurnal Prestasi, Vol 13, No 1, Juni 2014.

Andayani, Sri. 2014. *Analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kualitas pemerintahan dan kinerja ekonomi di daerah kabupaten atau kota Provinsi Jawa Timur*. Jurnal ekonomi. Universitas Brawijaya.

Azzumar, Rizky. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ,Dana Perimbangan, Investasi Swasta, Tenaga kerja, terhadap Pertumbuhan Ekonomi di era desentralisasi Fiskal tahun 2005-2009 (studi kasus Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa tengah.Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.*

Badan Pusat Statistik, Tahun 2011-2015. www.bps.go.id.

Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Laporan dan Realisasi APBD, Tahun 2011-2015. www.djpk.depkeu.go.id.

Dihan, Lucky. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Jumlah Tenaga Kerja dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Solo Raya Tahun 2003-2010*. Skripsi. Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta. Salemba Empat.

Haryanto. 2005. *Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu.* Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 2, No. 1, Februari 2005.

Hasrina. 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah.* Thesis. Universitas Diponegoro.

http://www.beritasatu.com/ekonomi/151417-d*irjen-pajak-tiga-alasan-penerimaaan-pajak-rendah*.html

http://www.geoenviron.blogspot.com/2013/02/*persebaran-barang-tambang-di-indonesia*.html

Husna, Asmaul & Mirna Sofia. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.* Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol 4, No 2, Desember 2013.

Jumadi, dkk. 2013. *The impact of fiscal decentralization on Local Economic Development in East Java*. Jurnal of Humanities and Social Since. Volume 13 E-SSN : 2279-0837, P-ISSN 2279-0845.

Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga.

Laeli, Najiah. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Pekerja Terhadap PDRB Kabupaten/Kota (Studi Kasus 35 Kabuapten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013*. Skripsi. Universitas Diponegoro.

Mangkoesubroto, Guritno. 1999. *Ekonomi Publik Edisi Ketiga.* BPFE-YOGYAKARTA. Yogyakarta.

Mangkusubroto, Guritno (1991). *Ekonomi Publik.* BPFE-Yogyakarta.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Penerbit Andi.

Maryati, Ulfi. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat.* Jurnal. Politeknik Negeri Padang.

Mentayani, Ida. 2015. *Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2013.* Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 8, No 1, Maret 2015.

Michael P. Todaro. 2004. *Ekonomi Pembangunan di Dunia ketiga,* terjemahan Mursid, Penerbit Balai Aksara, Jakarta.

Mulyono. 2012. *The Impact of fiscal Desentralization On Region Economic Developmentin Indonesia for the periode2005-2008.*Makalah disajikan dalam kongres ISEI tanggal 26 Mei 2012 di Malang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang *Pedoman Penyususnan APBD*

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan*

Peterson & Brakarz. 1991. *Implementation Rules for Fiscal Desentralization and Economic Growth*. Georgia State University.

Rusmanto. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh.* Jurnal Mahasiswa Ekonomi, Vol 1, No 1, (2015).

Shochrul, Ajija dkk. 2011. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Manado Tahun 2001-2010*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 14, No 3, Oktober 2011.

Simanjuntak, Robert. 2005. *Dana Alokasi Umum-Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah.* Jakarta. Penerbit Buku Kompas.

Sukirno, Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Modern*. Yogyakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada

Sukirno, Sadono. 2000. *Pengantar Teori Makro*. Yogyakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang *Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang *Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Vaques dan McNab. 2006. *Fiscal Desecentralization Macrostability and Growth.*Scholar Work. Georgia State University.

Wibowo, Muhammad. 2006. *Analisa Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur.* Skripsi. Universitas Brawijaya.

Wibowo, Puji. 2008. *Mencermati dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah*. Jurnal Keuangan Public.Vol 5 No 1.

Widarjono, Agus. 2007. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta. Ekonesia.

Zhang dan Zou. 1998. *Fiscal Desentralization, Public Spending and Economic Growth in China*. Jurnal of Public Economics 67 221-240.

Zulyanto, Aan. 2010. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*. Tesis . Universitas Diponegoro.